



Peran Dinas Pertanian Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe

Windi¹ , Siti Hazzah Nur R^{2*} 

¹Universitas Sumatera Utara, Medan 20155, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara, Medan 20155, Indonesia

*Corresponding Author: sitihazzah@usu.ac.id

INFO PASAL

Log Artikel:

Received: 08 Juni 2024

Revised: 10 Juni 2024

Accepted: 01 Juli 2024

Tersedia online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN: xxx

P-ISSN: xxx

How to cite:

Windi & R, Siti, H.N. (2024). Peran Dinas Pertanian Dalam Penyaluran pupuk Bersubsidi di Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe. SAJJANA: Public Administration Review, 2(1), 26-30.

ABSTRAK

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian mencanangkan program pupuk bersubsidi untuk membantu masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani. Pupuk bersubsidi yang diberikan tidak dapat ditebus oleh seluruh lapisan masyarakat. Di wilayah Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe ditemukan banyak masyarakat penerima pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran, sehingga diperlukan peran dinas pertanian dalam menyalurkan pupuk bersubsidi agar pupuk bersubsidi tersebut sesuai peruntukannya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara detail peran Dinas Pertanian dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Karo, Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Barusjahe. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau seluruh data yang dikumpulkan, yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Siagian yaitu peran pemerintah sebagai stabilisator, pelopor, modernisasi, katalis dan dinamisme.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, pupuk subsidi

ABSTRACT

The central government, through the Ministry of Agriculture, launched a subsidized fertilizer program to help people who make a living as farmers. The subsidized fertilizer provided cannot be redeemed by all levels of society. In the Sukanalu Village area, Barusjahe District, it was found that many people who received subsidized fertilizer were not on target, so the role of the agricultural service was needed in distributing subsidized fertilizer so that the subsidized fertilizer was suitable for its intended use. So the aim of this research is to find out and describe in detail the role of the Agriculture Service in the distribution of subsidized fertilizer in Sukanalu Village, Barusjahe District. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation carried out at the Karo Regency Agricultural Service Office, Barusjahe District Agricultural Extension Agency Office. The data obtained was then analyzed qualitatively by reviewing all the data collected, which was supported by the results of interviews with the theoretical approach put forward by Siagian that is the role of government as a stabilizer, pioneer, modernizer, catalyst and dynamist.

Keyword: Role of Government, Regional Government, Subsidized Fertilizer



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. <http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

1. Latar Belakang

Desa Sukanalu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Barusjahe, desa ini memiliki jumlah penduduk 5110 jiwa dengan hampir kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Untuk melihat lebih lanjut terkait jumlah penduduk dan jenis pekerjaan masyarakat Desa Sukanalu dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Sukanalu

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Pegawai	Petani	Lainnya/Tidak Bekerja
1	2018	3978	38	2964	976
2	2019	4266	35	3250	981
3	2020	4553	32	3500	1021
4	2021	4867	35	3745	1087
5	2022	5110	37	4006	1101

Sumber: Kantor Kepala Desa Sukanalu 2023

Berdasarkan pada Tabel 1.2 jumlah penduduk yang ada di desa ini memiliki kenaikan setiap tahunnya dan dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian didesa ini sebagai petani, dikatakan sebagai petani karena pada Tabel 1.2 dapat dilihat bagaimana perbandingan jumlah penduduk dengan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, contohnya pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk 4867 jiwa dan sebanyak 3745 Jiwa bermata pencaharian sebagai petani dan mengalami kenaikan ditahun 2022 dengan 5110 Jiwa dan bermata pencaharian petani sebanyak 4006 Jiwa. Sehingga dapat dipaparkan bahwa masyarakat di desa ini memiliki mayoritas pekerjaan masyarakat sebagai petani. Sesuai observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat pra penelitian ditemukan bahwa Kelompok tani yang ada di desa sukanalu ada sebanyak 33 kelompok tani yang sudah dibentuk. Namun berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan ada 8 kelompok tani yang sudah tidak aktif lagi sehingga hanya 25 kelompok tani yang masih aktif dan setiap kelompok tani terdiri dari 20-25 anggota. Untuk melihat lebih lanjut terkait nama kelompok tani di Desa Sukanalu dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Nama Kelompok Tani Desa Sukanalu

No	Nama kelompok	Anggota kelompok
1	Mbuah Page	23
2	Page Suah	24
3	Page Kenjahe	22
4	Terpuk Ukir	20
5	Terpuk Mecu	25
6	Terpuk Gugung	25
7	Mereh Lau	25
8	Page Kenjulu	24
9	Terpuk Julun	23
10	Tegun Ngemo	20
11	Merdang Merdem	22
12	Uruk Sampuren	21
13	Deleng Pantar	24
14	Rambah Waren	25
15	Kuta Talah	22
16	Deleng Gara	24
17	Deleng Ganjang	24
18	Mbal-mbal	23
19	Kujuma kurumah	24
20	Simulih Karaben	25
21	Kehulin	23
22	Radu Ras	23
23	Je Jore	22
24	Buluh Belin	24
25	Suah	23

Sumber: Kios Pupuk Ivo Sukanalu 2023

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa cukup banyak kelompok tani yang ada di Desa Sukanalu dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Dengan banyaknya anggota kelompok tani ini tentu banyak juga kebutuhan pemenuhan subsidi pupuk ke setiap nama kelompok tani yang ada. Pemberian pupuk bersubsidi harus memenuhi enam prinsip utama yang disebut dengan 6T (Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu). Dalam hal ini Dinas pertanian berperan dalam penyaluran pupuk belum dikatakan bekerja dengan maksimal, dinas pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Peran dinas pertanian yang belum maksimal yaitu dinas pertanian belum bisa memilah masyarakat yang benar benar pantas untuk mendapatkan pupuk.

Dinas pertanian juga memiliki tugas untuk melihat langsung masyarakat yang sudah didata oleh kelompok tani sebagai kalayakan untuk menerima pupuk. Kelangkaan pupuk yang terus menerus terjadi membuat banyak masyarakat yang gagal panen dan banyak keluhan petani yang tidak didengar oleh dinas pertanian, keluhan yang sering dilontarkan oleh petani yaitu kalayakan penerima pupuk dan dinas pertanian belum bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sasaran utama pupuk adalah masyarakat bermata pencaharian petani, salah satu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani adalah masyarakat desa dengan kata lain ekonomi didukung oleh pertanian.

Agar mampu mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, dalam mendukung pembangunan pertanian dinas pertanian harus memperhatikan kebutuhan pokok tanaman seperti pupuk. Pupuk terbagi kedalam dua jenis yang pertama yaitu pupuk subsidi dan yang kedua adalah pupuk non subsidi, pupuk subsidi ini merupakan pupuk yang disubsidi dari pemerintah sehingga dalam proses penjualan ketangan masyarakat mendapatkan potongan harga. Pupuk subsidi tidak diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian dengan syarat tertentu seperti yang telah tertuang di Permentan No.10 tahun 2022 syarat menerima pupuk subsidi yaitu:

1. Menanam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Menggarap lahan maksimal 2 Ha
3. Tergabung kedalam kelompok tani.

Dalam syarat di atas maka masyarakat yang menerima pupuk subsidi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pada umumnya pupuk subsidi cenderung menyebabkan masa penyerapan yang lebih lama dan berbeda dengan pupuk non subsidi dikarenakan pada kandungan bahan yang secara signifikan berbeda. Pada pupuk subsidi cenderung memiliki kandungan yang sama dan pada non subsidi memiliki kandungan yang bervariasi sehingga dalam proses penyerapan lebih cepat. Perbedaan harga dan target pasar. Harga pupuk subsidi cenderung lebih murah dibandingkan dengan pupuk yang non subsidi karena pada pupuk subsidi adanya pendanaan yang berasal dari pemerintah. Warna dan kemasan pupuk. Warna pupuk subsidi dan non subsidi dibuat berbeda dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam penggunaan pupuk subsidi. Contoh perbedaan pupuk urea yang subsidi warnanya cenderung kearah pink muda sedang pupuk urea yang non subsidi warnanya cenderung ke arah putih. Selain itu pada kemasan pupuk jika pupuk subsidi pada kemasannya bertuliskan pupuk subsidi pemerintah sedangkan kemasan pupuk yang non subsidi kemasannya tidak ada tulisan pupuk subsidi pemerintah. Kualitas pupuk. Kualitas pupuk subsidi dengan non subsidi tidak jauh berbeda karena pada hasil panen yang dihasilkan oleh pupuk subsidi dan non subsidi tidak begitu jauh berbeda.

2. Metode

Menurut Danin (2002) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dinamis dan dapat ditemukan melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksi. Bentuk penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggambarkan suatu masalah dalam penelitian yang dilakukan dan menemukan masalah dari masalah tersebut. Dalam metode ini peneliti langsung terlibat ke lapangan yang bertindak sebagai pengamat dan mengamati fenomena, hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam melihat bagaimana peran dinas pertanian dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Analisis data merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti dan diperoleh secara lengkap.

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa sukanalu kecamatan barusjahe kabupaten karo, desa sukanalu kecamatan barusjahe kabupaten karo dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan adanya beberapa masalah dalam penyaluran pupuk subsidi yang dilakukan oleh dinas pertanian.

2.2 Penentuan Informan

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Nama
1	PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)	3	1. Sri Alemina Br Ginting (Koordinator Badan Penyuluhan Pertanian) 2. Alim Sitepu (Penyuluh Lapangan Pertanian) 3. Nikson Barus (Penyuluh Peratanian Lapangan)
2	Ketua Kelompok Tani	2	1. Sinarta Sembiring (Ketua Kelompok Tani) 2. Suruhen Sitepu (Ketua Kelompok Tani)
3	Masyarakat Pengguna Pupuk Subsidi	5	1. Cupanda Br Sembiring (Penerima Pupuk) 2. Diana Br Sitepu (Penerima Pupuk) 3. Timbangan Ginting (Penerima Pupuk) 4. Betaria Br Sembiring (Penerima Pupuk) 5. Firman Perangin-angin (Penerima Pupuk)
4	Dinas Pertanian	2	1. Erik Sitepu (Kepala Penyuluhan) 2. Ferry Sebayang (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana) 3. Dessy Ardiana Br Ginting (Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan)
5	Kios Pengencer Pupuk	1	Pupuk UD.IVO Sukanalu
Jumlah		13	

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2023

2.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer dan data sekunder tersebut yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer penelitian ini dinas pertanian kabupaten karo dan masyarakat penerima pupuk subsidi. Data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berguna untuk mendukung proses deskripsi dan analisis masalah yang sedang diteliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung yang peneliti dapatkan setelah memperoleh informasi dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen atau arsip serta gambar yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku-buku ataupun media internet yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti.

2.4 Teknis Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007:243), terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. Data Reduction (reduksi data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi kan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Display Data (penyajian data) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan. Dengan men-display-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan, Dimulai dengan menetapkan seorang informan yang dipercaya sehingga peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.

2.5 Teknik Kebahasaan Data

Dalam penelitian ini dilakukan Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah Teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012) triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pebanding terhadap data itu. Triangulasi dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan, hal ini dilakukan supaya dalam suatu penelitian dapat terjadi pemahaman yang berbeda antara peneliti dengan informan mengenai suatu objek yang diteliti, oleh karena itu untuk menghindari adanya pemahaman yang berbeda digunakan triangulasi dengan cara peneliti langsung melakukan uji pemahaman kepada informan.

Denzin dalam moleong membedakan empat macam triangulasi sebagai Teknik pemeriksaaan, antara lain: sumber, metode, penyidik dan teori.

1. Triangulasi sumber, membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, dalam triangulasi dengan sumber yang terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.
2. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yakni, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan penyidik atau pengamat yang lainnya membantu mengurangi penyimpangan dalam pengumpulan data.
4. Triangulasi teori, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan model teori Peran Siagian (2012), untuk melihat bagaimana Peran Dinas Pertanian Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di esa Sukanalu Kecamatan Barusjahe. Adapun model teori Peran Siagian (2012) terdiri dari:

3.1 Stabilisator

Menurut Siagian (20012) Stabilisator merupakan peran pemerintah untuk mewujudkan perubahan yang tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial atau menjadi tidak menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran dapat diwujudkan dengan menggunakan berbagai cara, antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan dan efektif dan pendekatan yang persuasive yang bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan pengertian stabilisator diatas dapat disimpulkan bahwa stabilisator merupakan peran pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Terkait peran tersebut peneliti melakukan wawancara Bapak Ferry Sebayang selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, beliau mengatakan bahwa:

“Peran dinas dalam penyaluran pupuk bersubsidi yaitu melihat bagaimana sasaran dari pupuk bersubsidi, maksudnya disini yaitu kami dari pihak dinas melihat masyarakat yang menerima pupuk sudah sesuai atau tidak, contohnya pada bulan juni yang lalu sewaktu pupuk datang dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten, pupuk sebelum dibagikan ke desa desa yang ada di tanah karo terlebih dahulu dinas pertanian melihat data data petani yang menerima pupuk subsidi dan data itu kami dapatkan dari badan prnyuluhan pertanian” (Dinas Pertanian, 24 November 2023, 10.15 WIB).

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas dapat dilihat bahwa dinas pertanian memiliki bagian dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk melihat apakah pupuk subsidi ini sudah sesuai dengan peruntukannya sehingga untuk mengurangi penyelewengan terhadap pupuk bersubsidi. Pemerintah mengharapkan dinas pertanian dapat mengayomi masyarakat dengan meminimalisir permasalahan yang sedang masyarakat alami, masalah pupuk subsidi adalah masalah yang sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat petani. Pada penyaluran pupuk subsidi yang tidak baik akan berdampak terhadap kelangkaan pupuk subsidi, kelangkaan pupuk yang membuat banyak kegagalan panen pada tanaman, sehingga diharapkan dengan berperannya dinas pertanian dapat membantu penyaluran pupuk bersubsidi yang tepatsasran dan penyaluran yang tepat waktu. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sriu Alemina Br Ginting selaku selaku Koordinator BPP Barusjahe, beliau mengatakan bahwa:

“Berbicara masalah kelangkaan pupuk subsidi yang dialami oleh masyarakat petani, dari dinas pertanian sendiri memberikan kepada kami badan penyuluhan pertanian yang ada di kecamatan untuk membuat solusi dari kelangkaan pupuk. Kalau diberikan tugas dari dinas pertanian untuk memberikan pengetahuan atau mengajari masyarakat petani untuk membuat kompos alami dari bahan pohon pisang yang sudah busuk serta dari kotoran hewan ternak lembu” (Kantor BPP Barusjahe, 24 November 2023, 14.15 WIIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas Dinas Pertanian tidak hanya memiliki tugas untuk menyalurkan pupuk bersubsidi tetapi juga mengembangkan pertanian, sesuai dengan fungsi dari dinas pertanian sebagai perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunana, peternakan dan penyuluhan dan melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunana, peternakan dan penyuluhan serta Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunana, peternakan dan penyuluhan. Dari fungsi yang telah dipaparkan bahwa dinas pertanian selain melakukan penyaluran pupuk bersubsidi memiliki fungsi yang lain dalam pertanian.

3.2 Pelopor

Pelopor menurut Siagian (2012) Selaku pelopor pemerintah harus mampu menjadi panutan (role mode) bagi seluruh masyarakat. Dengan kepeloporan, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Terkait hal tersebut maka pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi dalam jumlah yang relative untuk mencukupi kebutuhan dengan diimbangi harga yang terjangkau sehingga yang mendasari pemerintah dalam memberikan subsidi pupuk bagi petani.

Kebijakan subsidi pupuk ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah agar mampu berperan sebagai insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan. Pupuk bersubsidi dalam penyalurannya harus memebuhi prinsip 6T yang mana prinsip 6T ini merupakan indikator dari keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi, adapun prinsip 6T yang meliputi Tepat Waktu, Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Harga, Tepat Tempat, dan Tepat Jumlah. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ferry Sebayang Selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, beliau mengatakan bahwa:

“Prinsip 6T merupakan indikator dari keberhasilan penyaluran subsidi pupuk, adapun prinsip 6T ini meliputi Tepat Waktu, Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Harga, Tepat Tempat, dan Tepat Jumlah. Dalam penyaluran pupuk bersubsidi belum memenuhi indikator dari prinsip 6T tersebut, jadi dalam penyaluannya pupuk ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip 6T, salah satu prinsip yang belum tepat adalah tepat waktu. Tepat waktu maksudnya pupuk datang tepat pada waktunya, tetapi prinsip ini belum maksimal seperti yang sering terjadi yaitu pupuk datang sudah melewati masa pemupukan tanaman sehingga pupuk ini sudah tidak dapat digunakan untuk memupuk tanaman” (Dinas Pertanian, 24 November 2023, 09.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, prinsip penyaluran pupuk bersubsidi memiliki prinsip 6T yang mana prinsip ini merupakan indikator dalam keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi, sesuai dengan hasil wawancara bahwa prinsip 6T belum sepenuhnya dapat dipenuhi dan dalam prinsip 6T tepatnya di Tepat Waktu belum dapat diterapkan dengan baik pada prinsip ini, sehingga dalam penyaluran pupuk bersubsidi sangat diperlukannya peran dinas pertanian sebagai media masyarakat petani dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ferry Sebayang selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, beliau mengatakan bahwa:

“Pupuk bersubsidi ini memiliki prinsip yaitu 6 T yang dimana 6 T ini diantaranya tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat dan tepat waktu. Semuanya prinsip itu belum dapat dikatakan sudah dijalankan contohnya tepat waktu, pupuk yang datang dari pusat dan sampai pada tangan Masyarakat itu tidak tepat waktu karena pupuk datang ketika Masyarakat sudah melewati masa pemupukan pada tanaman sehingga pupuk yang diterima dapat dikatakan sudah tidak berguna karena masa pemupukan yang sudah lewat” (Dinas Pertanian, 24 November 2023, 10.30 WIB).

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas pupuk yang datang dari pusat dan sampai pada tangan Masyarakat tidak tepat waktu karena seperti contoh yang telah dijelakan oleh Bapak Ferry Sebayang yakni pupuk telah sampai di kios telah melewati masa pemupukan pada tanaman sehingga pupuk yang diterima oleh

Masyarakat sudah tidak dipakai lagi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Sri Alemina br Ginting selaku Koordinator BPP Barusjahe, beliau mengatakan

“Memang benar prinsip 6 T itu belum dapat dikatakan sudah diterapkan dan memang benar pupuk yang datang ke kios itu sudah melewati masa pemupukan pada tanaman jadi buat apa lagi pupuk yang datang kalo masa pemupukan sudah lewat, kalua dibilang kenapa terlambat datang kami sebagai BPP tidak tau karena yang mengirim pupuk itu dari Perusahaan pupuk jadi mungkin saja di perjalanan ada kendala kita tidak tau” (Kantor BPP Barusjahe, 27 November 2023, 10.17 WIB).

Sesuai wawancara diatas jelas kesimpulannya, terdapat permasalahan dalam penerapan prinsip 6T, terutama terkait ketepatan waktu pengiriman pupuk. Pihak BPP Barusjahe mengakui kendala ini dan menyatakan pupuk yang datang terlambat sudah tidak lagi berguna bagi tanaman. Hal tersebut sama dengan pernyataan oleh Ibu Cupanda br Sembiring selaku petani yang menerima pupuk bersubsidi di desa sukanalu, beliau mengatakan bahwa:

“Pupuk yang datang ke kami sebagai petani itu belum tepat waktu jadi dalam pemupukan pada tanaman contohnya kemarin sewaktu saya menanam padi di bulan januari dan setelah memasuki masa pemupukan pada padi belum datang pupuk sehingga kami harus memakai pupuk yang non subsidi dan harganya sekarang sangat mahal dan beberapa minggu setelah saya melakukan pemupukan pupuk subsidi sudah ada di kios jadi ketika pupuk yang datang itu saya ambil saya tidak gunakan lagi karena padi saya sudah saya pupuk” (Rumah Ibu Cupanda, 25 November 2023, 18.45)

Dalam wawancara dari beberapa Masyarakat ditemukan prinsip 6 T yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat. Dari 6 T tersebut belum dapat diterapkan dengan baik seperti hasil wawancara diatas bahwa tepat waktu mejadi masalah dalam masa pemupukan, masa pemupukan pada tanaman tidak boleh lewat seperti yang dikatakan oleh Ibu Diana br Sitepu jika masa pemupukan sudah lewat maka tanaman tidak akan dipupuk dan setelah pupuk datang maka tanaman akan dipupuk dan hasilnya akan kurang maksimal. Petani yang mengalami ekonomi yang kurang mencukupi akan merasakan hasil panen yang turun karena pemupukan yang tidak tepat waktu, oleh karena itu semua petani penerima pupuk bersubsidi mengharapakan pupuk keluar tepat waktu.

3.3 Modernisator

Modernisator merupakan perubahan kearah yang modern atau maju, berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dinas pertanian melalui badan penyuluh pertanian telah membawa masyarakat petani menuju petani modern dengan adanya penambah wawasan yang diberikan akan membawa mengubah pola pikir masyarakat petani untuk belajar membuat hal yang baru seperti membuat kompos alami yang telah dilaksanakan ketika mengalami kelangkaan pupuk.

Pembangunan pertanian memiliki tujuan untuk mendukung ketahanan pangan, dengan Pembangunan pertanian maka akan mempengaruhi laju teknologi dalam era globalisasi persaingan dalam perdagangan komoditas akan semakin meningkat dengan demikian produk pangan dan industry pangan harus memiliki daya saing yang kuat. Dalam hasil observasi peneliti dinas pertanian karo dalam rangka mendorong Pembangunan pertanian serta pengembangan pertanian modern yakni dengan meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan untuk mewujudkan daya saing produk tanaman diperlukannya penyaluran pupuk yang stabil dan memadai sehingga dengan demikian dapat tercapainya Pembangunan pertanian.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi dinas pertanian memiliki kewajiban untuk melihat alur penyaluran pupuk bersubsidi, sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Dessy Ardiana br Ginting selaku kepala seksi pupuk pestisida dan alsintan, beliau mengatakan bahwa:

“peraturan penyaluran pupuk bersubsidi sudah ada sejak awal dalam peraturan keputusan jenderal prasarana dan sarana pertanian no. 07 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi, dalam peraturan itu tertulis bahwa pada saat penyaluran pupuk bersubsidi kepada masyarakat mulai dari kios atau pengencer ke petani yang dimana pada saat melakukan penebusan harus membawa KTP, hal ini dilakukan dengan harapan agar dalam penyalurannya semakin maksimal. Jika petani menebus pupuk hanya datang saja tetapi tidak membawa KTP maka tidak akan dapat menebus pupuk subsidi, tidak semua masyarakat menerima pupuk subsidi jika NIK sipenebus tidak ada dalam penerima pupuk maka pupuk tidak bisa ditebus” (Kantor Dinas Pertanian, 24 November 2023, 11.45 WIB)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka KTP adalah syarat dalam penebusan pupuk subsidi sehingga jika NIK sipenebus pupuk tidak keluar dalam penerima pupuk subsidi maka tidak akan dapat ditebus, hal ini dapat menjadi salah satu pendorong yang membawa masyarakat petani menuju petani yang modern. Pemerintah melalui dinas pertanian mendorong petani semakin maju agar menuju Pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Petani modern merupakan upaya yang dilakukan oleh dinas pertanian untuk perubahan paradigma dalam Pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas yang menjamin keamanan pangan dan berkelanjutan. Pemerintah berupaya mewujudkan pertanian yang modern, pertanian modern merupakan usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi terbaru, sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sri Alemina Br Ginting selaku Koordinator BPP Barusjahe, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam membangun pertanian, pemerintah akan melakukan apapun agar masyarakatnya Makmur dan Sejahtera, selain dari penyaluran pupuk bersubsidi sifat yang membangun pertanian bisa dilihat dengan adanya pertambahan wawasan kelompok tani dalam menciptakan pupuk yang alami yang dinamakan dengan kompos. Seperti yang sudah dilakukan dalam mengatasi kelangkaan pupuk, kelompok tani membuat kompos alami sebagai pengganti pupuk dan hal ini tentunya bersifat membangun pertanian” (Kantor BPP Barusjahe, 27 November 2023, 13.45 WIB).

Sesuai hasil wawancara diatas pemerintah menunjukkan komitmennya dalam membangun sektor pertanian, tidak hanya melalui penyaluran pupuk bersubsidi, tetapi juga dengan meningkatkan wawasan dan kemampuan kelompok tani, seperti mendorong mereka untuk membuat pupuk kompos alami sebagai alternatif.

3.4 Kasalitataor

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara, pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator Pembangunan tatanan masyarakat selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja melainkan dengan mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur masyarakat dalam suatu wilayah dan wajib melaksanakan dan memberikan pelatihan serta memenuhi fasilitas dan sarana serta prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nurdin (2014) peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah memiliki posisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah serta negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk Pembangunan partisipasi.

Keberhasilan suatu kegiatan tidak terlepas dari dukungan dana, ketersediaan aparat teknis dan non-teknis, serta sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut lebih banyak menyangkut lemahnya koordinasi dan pemahaman yang berbeda pada berbagai tingkat, ancaman iklim, alih fungsi lahan, terbatasnya sumberdaya aparatur, terbatasnya infrastruktur pertanian, masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dan aparat pertanian dalam penggunaan teknologi dan belum optimalnya kelembagaan petani yang ada. Sumber daya manusia sangat penting perannya dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Sumber daya manusia yang berperan dalam penentuan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sumber daya manusia yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sukanalu yaitu, dinas pertanian, BPP Barusjahe, penyuluh pertanian lapangan dan kios. Peran tenaga dalam keberlangsungan penyaluran pupuk subsidi di wilayah Desa Sukanalu kecamatan Barusjahe sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Dinas Pertanian dan peran BPP yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan penyaluran pupuk. Hasil pengumpulan data peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, jumlah SDM yang ada di Badan Penyuluh Pertanian di Kecamatan Barusjahe sudah mencukupi. Berdasarkan observasi peneliti ada 10 petugas penyuluh pertanian lapangan termasuk Koordinator yang melaksanakan program penyaluran pupuk di kecamatan barusjahe. Adapun petugas yang ada di Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah tenaga pelaksana Badan Penyuluhan Pertanian

No	Nama Pegawai	Jabatan
1	Sri Alemina Ita Br Ginting, S.P	Koordinator
2	Lasmi Simarmata, S.P	PPL
3	Esa Br Sembiring, S.P	PPL
4	Nikson Barus	PPL
5	Sukses Sitepu	PPL
6	Alim Sitepu	PPL
7	Litnawati Br Ginting	PPL
8	Marlinta Rut Br Sembiring	PPL
9	Anitasari Br Sebayang	PPL

10	Ripka Br Sitepu, S.T.P	PPL
----	------------------------	-----

Sumber: Badan Penyuluhan Pertanian, 2023

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas jumlah tenaga pelaksana program penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Barusjahe berjumlah 10 orang, 1 koordinator BPP di Kecamatan Barusjahe dan 9 orang penyuluh pertanian lapangan di desa yang ada di Kecamatan Barusjahe. Kecamatan Barusjahe terdiri dari 19 desa jadi di setiap desa yang ada di kecamatan Barusjahe masing masing petugas memegang 1 sampai 2 desa. Dalam penyaluran pupuk bersubsidi dinas pertanian sebagai katalisator yang dapat mengendalikan faktor negatif atau penghalang dalam penyaluran pupuk dari distributor sampai di tangan masyarakat, dinas pertanian sebagai katalisator yang berperan dalam meminimalisir penghambat penyaluran pupuk bersubsidi belum terlihat sebagai pengawas penyaluran pupuk bersubsidi agar dapat meminimalisir ketidaktepat sarannya pupuk subsidi. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dessy Ardiana br Ginting selaku kepala seksi pupuk pestisida dan alsintan, beliau mengatakan bahwa:

“saya sebagai penyuluh pertanian yang terjun kelapangan langsung yang diutus dari dinas pertanian kalau berbicara tentang masalah yang ada di penyaluran pupuk bersubsidi pastinya ada, permasalahan yang sering saya temui dilapangan yaitu pada penyaluran pupuk ke tangan masyarakat dan masyarakatnya yang tidak menebus pupuk dari kios sehingga untuk meminimalisir hambatan itu diberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak menebus pupuk yang dimana sanksinya yaitu tidak diperbolehkan menebus pupuk untuk penerimaan selanjutnya”(Kantor Dinas Pertanian, 24 November 2023, 13.35 WIB)

Hal yang sama dipertegas Kembali oleh Bapak Sinarta Sembiring selaku ketua kelompok tani di desa sukanalu, menyatakan bahwa terdapat hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program, beliau mengatakan

“Selama program penyaluran pupuk bersubsidi melalui KTP berjalan ada hambatan yang ditemui adalah ketika dalam penebusan pupuk bersubsidi di kios banyak anggota kelompok tani yang namanya tidak keluar karena belum mengupdate kartu keluarganya dan selain itu hambatan yang ditemui yaitu pupuknya diwakili untuk mengambilnya padahal itu tidak bisa karena harus orang yang bersangkutan untuk menerimanya”. (Rumah Bapak Sinarta Sembiring, 25 November 2023, 20.08 WIB)

Berdasarkan hasil analisis penebusan pupuk bersubsidi melalui KTP dalam penyaluran pupuk bersubsidi, dampak dari pelaksanaan program adalah ditemukannya masyarakat petani atau anggota kelompok tani yang belum mengupdate kartu keluarganya atau KTPnya agar sesuai dengan nama yang ada di SIMLUHTAN. Syarat utama dalam menerima pupuk bersubsidi adalah nama yang ada di KTP sudah sesuai dengan yang dicapil agar jika nama yang keluar dari SIMLUHTAN sudah sesuai sehingga boleh untuk mengambil pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh dinas pertanian dalam meminimalisir hambatan dalam penyalurannya kepada masyarakat mendapat respon yang baik, penyaluran yang sudah dilakukan mulai dari distributor sampai tangan masyarakat. Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten Karo meratakan semua penyaluran pupuk bersubsidi disetiap daerah yang ada di Kabupaten Karo pada penelitian ini melakukan penelitian di desa Sukanalu berdasarkan data yang ditemukan ketua kelompok tani yang ada di desa sukanalu sebanyak 33 ketua kelompok yang artinya bahwa ada sebanyak 33 kelompok yang ada di desa sukanalu dan banyak ditemui kelompok yang sudah tidak aktif sehingga didapatkan data dari hasil observasi peneliti bahwa di desa sukanalu hanya 25 kelompok yang aktif dan satu kelompok terdiri dari 20-25 orang. Dari kelompok tani yang ada di desa Sukanalu banyak masyarakat petani yang mendapat pupuk subsidi yang tidaktepat sasaran sehingga peran dinas pertanian sebagai katalisator disini untuk meminimalisir masalah penyaluran pupuk subsidi.

3.5 Dinamisator

Menurut Labolo (2010) mengatakan bahwa Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Pemerintah sebagai dinamisator telah berupaya mempengaruhi masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi guna menunjang keberhasilan aktivitas pertanian. Dalam menunjang keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi terlebih dahulu perlunya peran dinas pertanian yang memulai dari pencatatan anggota penerima pupuk subsidi dan melakukan pengecekan terhadap anggota kelompok tani sebagai penerima pupuk

bersubsidi selain itu juga harus dilakukannya sosialisasi bagi penerima pupuk bersubsidi agar mengerti kategori dari peruntukan pupuk bersubsidi. Dalam berjalannya sebuah program hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah sosialisasi, sosialisasi merupakan sebuah proses mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara cara hidup, nilai-nilai, dan norma norma sosial yang terdapat dalam Masyarakat.

Menurut Aryani (2020:467) sosialisasi dan penyuluhan merupakan berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip belajar sehingga harapannya dengan adanya penyuluhan ini maka akan membantu masyarakat lebih sadar akan pentingnya penebusan pupuk bersubsidi. Kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan di losd atau *jambur*. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di losd atau *jambur* dengan pelaksanaannya bersama dengan jadwal pertemuan kelompok tani. Sesuai dengan penjelasan diatas untuk mengetahui lebih lanjut terkait sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pertanian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sri Alemina Br Ginting Selaku Koordinator BPP Barusjahe, beliau mengatakan bahwa:

“sosialisasi seharusnya wajib dilakukan oleh dinas pertanian ataupun badan penyuluhan pertanian untuk masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana peruntukan dari pupuk bersubsidi ini tetapi disini sosialisasi tidak berjalan dengan baik, dinas pertanian sebagai perpanjangan tangan pemerintah tidak melakukan sosialisasi dengan baik” (Kantor BPP Barusjahe, 27 November 2023, 14.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dengan Ibu Sri sosilisasi yang dilakukan oleh dinas pertanian sangat penting untuk masyarakat karena dengan adanya sosialisasi maka akan terjalannya hubungan antara dinas pertanian dengan masyarakat yang baik. Dinas pertanian telah Menyusun perencanaan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi sehingga dalam perencanaan ini merupakan tahap awal yang dilakukan dalam Menyusun sebuah hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, hal yang mendorong keberlangsungan program ini tentunya memerlukan bantuan para stakeholder dalam pelaksanaan program penyaluran. Dalam hal ini pentingnya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat petani karena dengan adanya sosialisasi akan terjalannya Kerjasama anatara petani dengan dinas pertanian. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Suruhen Sitepu Selaku Ketua Kelompok Tani beliau mengatakan bahwa:

“sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pertanian tidak berjalan dengan baik dan saya selaku ketua kelompok tani juga pernah bertanya pada penyuluh pertanian lapangan terkait masalah sosialisasi mereka mengatakan bahwa sosialisasi yang dilalukan oleh badan penyuluh pertanian berdasarkan perintah dari dinas pertanian sehingga kalau tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan karena tidak adanya perintah dari dinas pertanian sehingga kami kelompok tani jarang melakukan pertemuan untuk sosialisasi”. (Rumah Bapak Suruhen Sitepu, 26 November 2023, 20.40 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi tidak berjalan dengan baik dari dinas pertanian kepada kelompok tani. Hal ini sesuai dengan mekanisme penyaluran pupuk subsidi masih terdapat kelemahan diantaranya sosialisasi tentang program subsidi belum berjalan optimal, ketersediaan pupuk di kalangan petani masih langka serta lemahnya pengawasan dalam menanggapi adanya peyelewengan. Sosialisasi mengenai program subsidi pupuk memang terjadi di kalangan masyarakat petani dikarenakan kurang paham dalam artian informasi dari pemerintah masih samar-samar sehingga mengakibatkan petani kurang mengoptimalkan haknya dalam memperoleh pupuk dan Pemerintah belum sepenuhnya berhasil dalam memberikan sosialisasi kepada seluruh petani.

Dengan demikian dapat dilihat bahwasanya dalam pelaksanaan program subsidi pupuk ini pemerintah hanya berfungsi membuat kebijakan dan mengarahkan pasar dan petani dijadikan sebagai pelanggan dengan didukung keterlibatan pihak swasta guna mencapai tujuan kebijakan pupuk subsidi. Masing-masing telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dikoordinasikan dengan baik. Selain itu hal ini diperkuat dari Republika.co.id tentang Jenis Pupuk Subsidi Dipangkas, ini Kata Petani, dalam berita ini tertulis bahwa pemerintah harus melakukan sosialisasi agar tak terjadi geejolak di kalngan petani. Ditengah naiknya harga pupuk jenis pupuk subsidi juga dikurangi dan kebijakan ini akan memberikan banyak dampak pada penurunan maupun peningkatakan produktivitas, sebelum kebijakan itu mulai diterapkan pemerintah harus melakukan sosialisasi secara massif kepada seluruh petani. Dalam hal ini sosialisasi harus dilakukan agar dapat mengurangi adanya penyelewengan pupuk.

Kesimpulan

Pupuk subsidi merupakan salah satu program pemerintah dalam bidang pertanian, pupuk subsidi bukan pupuk yang didapatkan secara gratis melainkan adanya pemotongan harga beli bagi petani. Pupuk subsidi

secara komprehensif sasaran utamanya adalah petani yang tidak mampu sehingga dalam penyalurannya pupuk subsidi ini terbagi menjadi 4 (empat) lini antara lain: Lini I adalah lokasi Gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah Pelabuhan yang tujuannya untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi Gudang di wilayah ibukota provinsi dan unit pengantongan pupuk. Lini III adalah lokasi Gudang distributor pupuk dan produsen di wilayah kabupaten yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai produsen. Lini IV adalah lokasi Gudang pengencer yang ditunjuk oleh distributor.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran dinas pertanian belum bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan dari pupuk subsidi yaitu tujuannya untuk membantu petani yang tidak dapat membeli pupuk di kios atau pengencer. Peran dinas pertanian sebagai pengawas selain itu peran dinas tidak kalah penting untuk melihat peruntukan pupuk subsidi agar tepat sasaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi, peran dinas pertanian tersebut belum dapat tercapai. Peran dinas pertanian dalam penyaluran pupuk subsidi di desa sukanalu belum dapat dikatakan sudah mencapai tujuan dari penyaluran pupuk bersubsidi.

Referensi

- Anis, S. M., Effendy, L., & Muslihat, E. J. (2014). Partisipasi Anggota Kelompok tani Dalam Penyusunan Rencana Definitif Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 9(1), 37-42.
- Azriani, Z., Refdinal, R., & Paloma, C. (2018). Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dalam meningkatkan ketahanan pangan di kota Padang. In *Proceeding Seminar Nasional Dies Natalis UNS Ke-42* (Vol. 2, No. 1, pp. 36-43).
- Barat, K. M., & Kahir, P. (2021). Dampak Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi Dan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Siru Kecamatan Lembor.
- Darapalgia, N. P. M. H., Aromatica, D., & Putera, R. E. (2022). Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(2), 85-100.
- Kuadrati, D. L., & Kusmiati, A. (2010). Faktor-faktor yang berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)*, 4(1), 63-80.
- Kuadrati, D. L., & Kusmiati, A. (2010). Faktor-faktor yang berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 4(1), 63-80.
- Lester, James P dan Joseph Steward Jr., 2000., *Public Policy: an Evolutionary Approach*, Belmont: Wadsworth
- Lumintang, F. M. (2013). Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Misrah, M., Sudarmi, S., & Rahim, S. (2020). Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(2), 530-545
- Rangkuti, S. (2012). Efetifitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Deli Serdang Studi Kasus di Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(2), 287-318.
- Safitri, M. A. (2011). *Distribusi pupuk subsidi kepada petani tebu dalam perspektif manajemen publik (Studi pada koperasi unit desa di Sumberpucung Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Sari, L. R., & Fahmi, A. (2018). Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Kecamatan Megaluh Jombang Dalam Perspektif Fenomenologis:(Studi Kasus Dusun Sudimoro Dan Dusun Paritan). *Margin Eco*, 2(2), 86-101.
- Setyowati, Intan., dan Haryani, Sri. (2016). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Restoran Taman Pringsewu Yogyakarta. *Jembatan. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan*. 13 (2) 57-72
- Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 21(1), 84-92.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & DCetakan ke-21*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sularno, S., Irawan, B., & Handayani, N. (2017). Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Jurnal Agrosains dan Teknologi*, 1(2), 73-87.
- Susila, W.R. 2010. Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. *Jurnal Litbang Pertanian* 29(2): 43-49.
- Utari, D. S., Matridi, R. A., & Mulyanti, P. S. (2021). Evaluasi Program Bantuan Nelayan di Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 613-626.

- Vidyanita, V. (2016). Kinerja birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Jombang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(1).
- Vidyanita, V. (2016). Kinerja birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Jombang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(1).
- Wardhani, W. F. (2019). Peran Politik Pertanian dalam Pembangunan Pertanian Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 83-94
- Menurut permentan nomor 69 tahun 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013
- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Perdagangan No.15 Tahun 2015 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.